

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampah menjadi salah satu sektor yang berkontribusi menciptakan efek emisi gas rumah kaca. Sampah bukan lagi sekadar buruk secara estetika, tetapi juga menjadi pemicu penurunan kualitas lingkungan. Pembakaran sampah secara terbuka, sampah yang dibuang seenaknya, pengelolaan sampah yang masih jauh dari kelayakan, serta masih minimnya kegiatan daur ulang sampah merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan yang masih terjadi hingga sekarang (CNN Indonesia, 2022). Berdasarkan laporan Bank Dunia yang bertajuk *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*, pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan sampah hingga 62,2 juta ton sampah, hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar ke-5 di dunia pada 2020 (Ahdiat, 2023). Produksi sampah nasional mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa timbunan sampah nasional mencapai 69,2 juta ton, yang mana sampah tersebut mayoritas berasal dari rumah tangga. Dari total sampah yang dihasilkan, sedikitnya 19,8 juta ton merupakan sampah plastik dan kertas yang belum terpilah, sementara 35,48 persennya masih belum dikelola dengan benar (Primantoro, 2023).

Pertumbuhan penduduk yang disertai dengan meningkatnya gaya hidup praktis dan pola konsumsi masyarakat turut mempengaruhi sumbangsih sampah, terutama sampah plastik. *World Population Review* mencatat, hingga 1 November

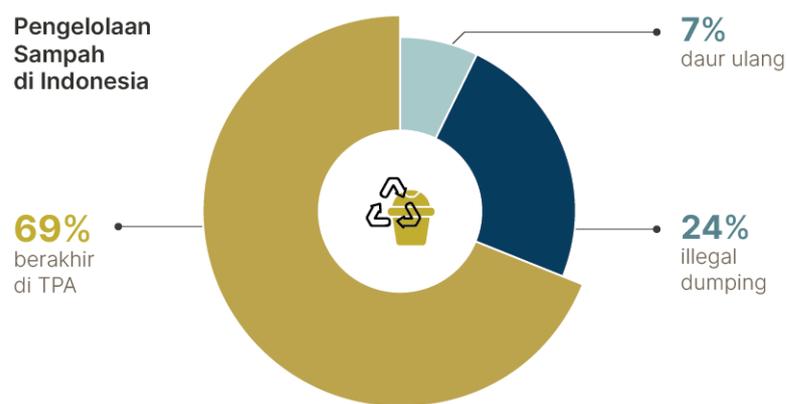
2022 total penduduk Indonesia menembus 275,5 juta orang. Angka ini membuat peringkat Indonesia berada di posisi keempat dengan penduduk terbanyak di antara negara G20 (Annur, 2022). Berdasarkan sensus Penduduk pada tahun yang dilakukan pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir (Idris, 2021). Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 270,2 juta jiwa, apabila melihat Sensus Penduduk pada tahun 2010 sebesar 237,63 juta jiwa maka dapat dilihat terjadi peningkatan hasil SP2020 dengan SP2010 sebesar 32,56 juta jiwa atau yang setiap tahunnya berada pada rata-rata 3,26 juta jiwa (*kompas.com, 2021*).

Peningkatan jumlah penduduk dengan berbagai macam pola dan gaya hidup yang beragam tentu membawa beberapa konsekuensi terhadap jumlah pasokan sampah. Salah satunya dapat terlihat dari frekuensi belanja online yang sebelumnya hanya sekali sebulan meningkat menjadi satu hingga sepuluh kali per bulannya. Survei yang tercatat dalam Laporan Survei Status Literasi Digital Indonesia, yaitu hasil kolaborasi Katadata *Insight Center* (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hanya terdapat 6% masyarakat yang mengaku tidak menggunakan marketplace untuk berbelanja, sisanya mengaku pernah menggunakan platform lokapasar untuk berbelanja setidaknya beberapa bulan sekali (37,9%), sebulan sekali (27,6%), dua hingga tiga kali dalam sebulan (14%), seminggu sekali (8,4%), dua hingga tiga hari sekali (4,2%), bahkan setiap hari (1,9%) (Haryanti, 2022). Dari aktivitas berbelanja ini

hanya sebesar 96% paket belanja online dikemas dengan menggunakan bahan plastik maupun *bubble wrap* (Novelino, 2022).

Berkaca pada data tahun 2021, volume sampah di Indonesia masih terbilang tinggi, yaitu sebesar 68,5 juta ton. Terdapat 24% atau sekitar 16 juta ton sampah yang sampai saat ini belum dikelola. Tercatat, hanya 7% yang terdaur ulang, sementara 69% masuk di TPA (DPR-RI, 2022). Berdasarkan capaian hasil dari penginputan data yang dilakukan oleh 203 Kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2022, diperoleh timbulan sampah sebesar 21,192,511.76 (ton/tahun). Persentase pengurangan sampah sebesar 16.83% atau sebanyak 3,566,882.86 (ton/tahun), dengan persentase penanganan sampah sebesar 48.82% atau sebanyak 10,346,527.89 (ton/tahun).

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pengelolaan Sampah di Indonesia**



Sumber: Sustainable Waste Indonesia

Pada grafik diatas, perilaku masyarakat dalam mengelola sampah masih cenderung mengalokasikannya ke TPA dibandingkan dengan mendaur ulang. Pertumbuhan penduduk yang semakin besar tentu tidak sebanding dengan jumlah

TPA di Indonesia, jika dihitung lebih jauh, sarana pengelolaan sampah di Indonesia masih terbilang kurang, yaitu hanya sebesar 54% dari total kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang layak dan memadai. Selain itu, kebanyakan TPA kurang memperhatikan pemanfaatan gas metan, yang mana gas metan apabila digunakan dengan jumlah signifikan akan menciptakan efek rumah kaca.

Melihat persoalan di atas, perlu dilakukan kegiatan secara berkelanjutan dalam mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sampah. Pengelolaan lingkungan hidup sendiri telah tertuang di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam hal ini, manusia menjadi bagian dari lingkungan hidup yang sifatnya bukan lagi objektif.

Unsur-unsur ini tentunya melihat lingkungan sebagai suatu hal yang penting dan perlu dijaga keberlangsungannya, namun pada kenyataannya manusia yang menjadi bagian dari lingkungan tersebut masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan dan keberlangsungan lingkungan. Berdasarkan perolehan data riset Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 diketahui hanya sebesar 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa dari banyaknya penduduk Indonesia yang berjumlah 264.161,2 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52.832,24 juta

masyarakat yang mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi kebersihan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan (*CNN Indonesia, 2018*).

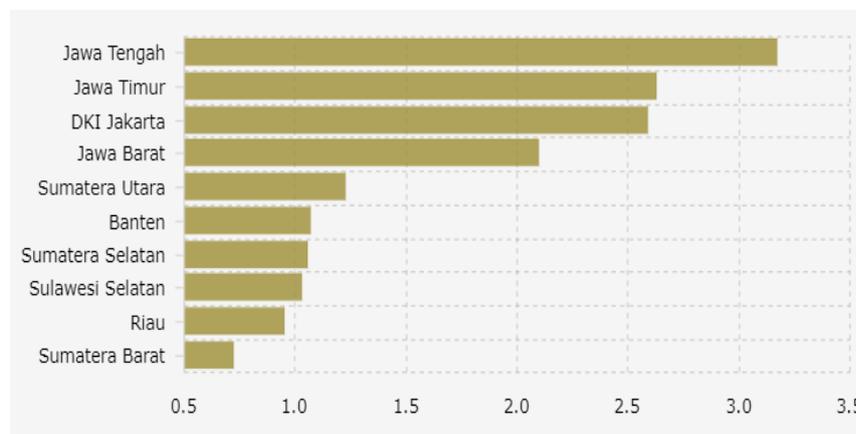
Permasalahan diatas membuat sampah menjadi salah satu masalah kompleks yang dalam penyelesaiannya perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (actor). Pemerintah selaku aktor yang berperan dalam menggerakkan negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terstruktur supaya tidak menghasilkan pengaruh negatif pada lingkungan, terutama kesehatan masyarakat. Hal ini selaras dengan hakikat peran dan tugas negara dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Hudzaifi, 2023). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2 dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah juga mempertegas bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah di Indonesia.

Pengelolaan sampah dalam hal ini telah dipersiapkan melalui sistem yang dapat menjaga persebaran sampah agar tidak sampai pada titik bahaya, hal ini dilakukan sebagai wujud mitigasi dan penanganan yang dilakukan. Pada umumnya, kegiatan pengelolaan sampah difokuskan pada 2 hal utama, yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang di

jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah dilaksanakan sejak dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir, sementara pengolahan sampah dipusatkan pada TPS (Tempat pengolahan sementara) dan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk memberikan deskripsi lebih lanjut, diperlukan kajian tentang penanganan sampah di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik KLHK, provinsi penghasil sampah terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah dimana timbulan sampahnya mencapai 4,3 juta ton pada tahun 2022 (Syauqi, 2022).

**Gambar 1.2**  
**Provinsi jumlah timbulan sampah Terbanyak Indonesia**

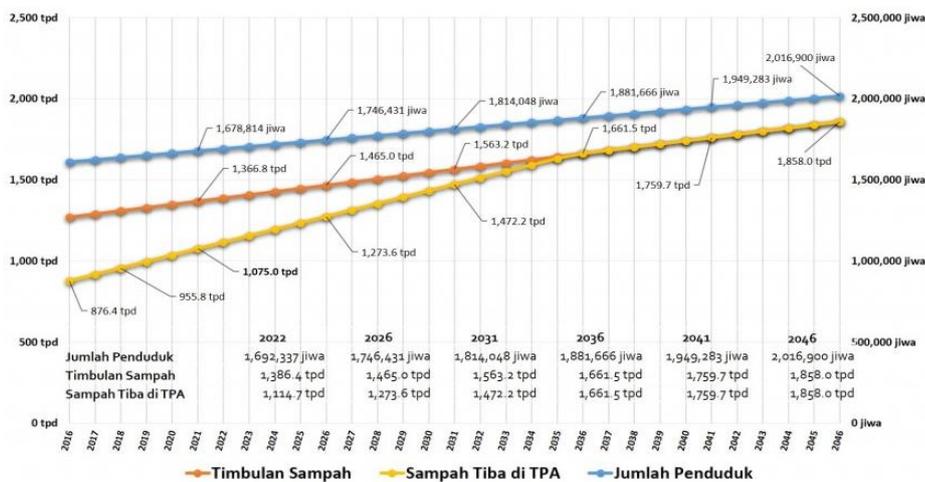


Sumber: *katadata.co.id*, 2022

Dikutip dari laman [dprd.jatengprov.go.id](http://dprd.jatengprov.go.id), daerah dengan penghasil sampah tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang, Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah menjadi salah satu kota penghasil sampah terbanyak di Indonesia, ibu

kota Jateng ini memproduksi 1.270 ton sampah per hari, dan sekitar 900 ton di antaranya dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap hari, namun demikian hanya sebagian kecil sampah yang dilakukan proses daur ulang (Rahmadi, 2022). Pengelolaan sampah di Kota Semarang yang menggunakan konsep 3R sudah diterapkan mulai tahun 1992 dengan difasilitasinya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jatibarang, namun upaya pemerintah ternyata belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Jumlah sampah semakin lama semakin bertambah. Memang secara teknis, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang mengatasi permasalahan sampah melalui cara lama yakni dengan mengambil, menampung di Tempat Penampungan Sampah (TPS) lalu kemudian membuangnya ke TPA Jatibarang. Pola penanganan yang seperti ini membuat Kota Semarang akan selalu menemukan kendala minimnya tempat yang menjadi wadah penampungan sampah dan beberapa permasalahan lain sebagai konsekuensi akan problematika perkotaan yang sangat kompleks.

**Gambar 1.3**  
**Proyeksi timbulan sampah di Kota Semarang**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2022

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dikutip dari laman [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id) pada 2021 sampah yang dibawa ke TPA Jatibarang mencapai 1,2 ribu ton lebih per hari atau sekitar 430 ribu ton per tahun. Produksi sampah di Kota Semarang yang dibawa ke TPA itu meningkat 10 persen lebih dibandingkan saat Pandemi Covid-19, dengan produksi sampah 900 ton per hari. Dari banyaknya produksi sampah tersebut, hanya sebagian kecil dari sampah yang didaur ulang, sisanya terbuang ke laut yang kemudian turut berpengaruh bagi lingkungan (Fundrika, 2022). Masih rendahnya tingkat daur ulang sampah ini dikarenakan adanya dependensi atau keterbatasan kemampuan dari para pihak yang berperan dalam proses daur ulang sampah termasuk di dalamnya adalah bank sampah ([humas.semarangkota.go.id](http://humas.semarangkota.go.id), 2019).

Mengatasi persoalan diatas, maka pemerintah Kota Semarang beserta dengan sejumlah pihak memberikan solusi dengan memperbaharui sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang tertuang dalam program bank sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Semarang, hingga pertengahan 2022 sudah berdiri 229 bank sampah yang tersebar di penjuru wilayah Kota Semarang (Susanto, 2022), hal ini berada jauh dengan jumlah yang sudah ditargetkan sebagaimana dikutip dari laman [semarangkota.co.id](http://semarangkota.co.id), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menargetkan jumlah bank sampah sebanyak 1.000 bank sampah di akhir 2023 mendatang (Qudstia, 2023).

Kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah merupakan salah satu kebijakan yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Kelurahan Tinjomoyo merupakan salah satu wilayah yang

menerapkan kebijakan ini, dimana dalam pelaksanaan pengembangan dan keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah memerlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang tertuang dalam program kegiatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat salah satu Bank Sampah di Kelurahan Tinjomoyo yang menarik dalam pelaksanaannya, yang mana selain Bank Sampah yang bernama Ngudi Lestari ini menjadi salah satu pelopor bank sampah di wilayah tersebut, bank sampah ini juga dipersiapkan guna mendukung program pemberdayaan dengan keterlibatan beberapa pihak. Perolehan manfaat juga bukan hanya dirasakan dari aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan, tetapi juga ekonomi, bahkan tabungan yang diperoleh masyarakat jika sudah mencapai target tertentu dapat ditukar dengan emas batangan.

Perolehan manfaat tidak serta-merta membuat bank sampah bebas dari permasalahan. Pengelolaan sampah pada bank sampah juga tentu menghadapi berbagai masalah, adapun permasalahan yang seringkali terlihat dan dialami oleh banyak bank sampah terdapat dalam pengembangan dan keberlanjutan bank sampah, yaitu dari segi motivasi pengurus maupun dukungan masyarakat sekitar (Istanabi et al., 2022). Permasalahan manajemen diantara anggota pengurus juga sering dialami, jadi dengan demikian, permasalahan yang sering dijumpai dalam pengelolaan bank sampah yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia (Wicaksono & Warsono, 2020). Persoalan SDM dalam pengelolaan sampah pada bank sampah juga ditemui di Bank Sampah Ngudi Lestari, seperti keterbatasan kemampuan manajerial dan keterbatasan kreativitas dalam mengembangkan hasil pemilahan sampah menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi, hal ini

dikarenakan kondisi pengurus yang sebagian besar sudah lanjut usia, sehingga pelaksanaannya pun tidak optimal (Wibisono, 2019).

Permasalahan yang juga ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah adalah berkaitan dengan pelatihan yang dinilai masih kurang, sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan secara terus menerus terhadap bank sampah guna memastikan prosesnya bekerja dengan tepat dan dapat berfungsi dengan sebaiknya. Tata kelola sangat beragam serta ketergantungan pada keterlibatan masyarakat dan kapasitas manajerial penyelenggara atau pengurus juga menjadi persoalan yang disebabkan karena sebagian besar bank sampah berdiri atas dasar inisiasi ide atau gagasan dari masyarakat sekitar, sehingga pengelolaannya pun dilakukan secara swadaya, sesuai kebiasaan, perilaku serta pengalaman masyarakat di sekitar bank sampah (I. Ahmad, 2022).

Pasal 3 Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah menjelaskan bahwa bank sampah harus memenuhi persyaratan pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, dan tata kelola bank sampah, namun dalam proses kegiatan observasi penulis masih ditemukan masalah-masalah mendasar yang belum sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku. Fenomena yang penulis temukan di lapangan antara lain fasilitas bank sampah yang belum sesuai dengan ketetapannya, seperti misalnya belum tersedianya komputer sebagai perlengkapan pendukung kegiatan, instrumen penunjang yang kurang, serta K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) yang belum tersedia, selain itu tata kelola bank sampah Ngudi Lestari sepenuhnya masih dilakukan secara tradisional, hal ini

didukung dengan belum tersedianya informasi berbasis online yang secara terperinci menjelaskan sistem bank sampah dalam bentuk *website* resmi.

Berdasarkan pada fenomena permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum mempunyai peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang bank sampah, dimana regulasi yang dikeluarkan hanya sebatas surat keputusan.
2. Belum terpadunya pengelolaan sampah yang benar dan berkelanjutan.
3. Perilaku dan motivasi masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampah.
4. Fasilitas bank sampah yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?
2. Apa saja yang menjadi kendala keberhasilan Kebijakan Pengelolaan

Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan kendala keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas substansi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.
2. Sebagai acuan referensi penelitian yang akan datang sehubungan dengan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala di dalamnya.

2. Bagi universitas serta pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas koleksi penelitian ilmiah untuk dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian yang akan datang.
3. Bagi instansi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan bagi instansi sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dapat ditinjau lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan saran dan rekomendasi, sekaligus menjadi salah satu bahan rujukan dalam rangka penyempurnaan terhadap kebijakan pengelolaan sampah khususnya pada Bank Sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan serta memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari yang telah dilaksanakan oleh instansi atau pemerintah daerah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya penulis dalam rangka menelusuri komparasi dan selanjutnya menemukan pemikiran baru untuk penelitian berikutnya. Dalam hal ini, penelitian terdahulu dapat memberikan kemudahan penulis dalam melakukan kajian penelitian dengan memosisikan penelitian serta membantu penulis dalam memperlihatkan keabsahan/orsinalitas dari penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan penelitian terdahulu yang

diperoleh dari berbagai referensi ilmiah yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dikaji. Berikut merupakan rangkuman penelitian terdahulu yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini.

1. Penelitian dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun)” oleh Muhammad Pajaryuanda (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) dan faktor apa saja yang menjadi penghambat di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di kecamatan Kundur Barat berada pada posisi interval penilaian cukup baik. Dilihat dari indikator (1) Kondisi angkutan sampah, evaluasi dilakukan dengan dua item penilaian yaitu kelayakan angkutan sampah dan jenis angkutan sampah. Hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa tanggapan pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berada pada kategori cukup baik, sementara berdasarkan hasil observasi di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang tertuang di dalam peraturan terkait. (2) Ketertiban masyarakat, yang mana item yang digunakan mencakup tempat masyarakat membuang sampah, serta perilaku atau sikap masyarakat dalam membuang sampah. Berdasarkan hasil pengisian

kuesioner, kedua item mendapat respon cukup baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, sedangkan dilihat dari pengamatan penulis, masih banyak ditemukan perilaku membuang sampah oleh masyarakat di kawasan terbuka, mulai dari selokan, sungai, dan sebagainya. (3) Sanksi dan denda, dimana item yang digunakan meliputi pemberian denda dan penindakan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tanggapan pemerintah daerah terbilang cukup baik, sementara masyarakat menilai pelaksanaannya masih berada pada kategori kurang baik. Hasil pengamatan juga ditemukan bahwa penindakan dan pemberian denda dalam kasus ini tidak berjalan. Faktor penghambat dalam kegiatan evaluasi ini sendiri berupa pendanaan yang masih terbilang kurang cukup, hal ini terlihat dari ketersediaan fasilitas yang belum memadai. Selain itu, masyarakat juga masih belum sepenuhnya terlibat aktif dalam mengelola sampah, hal ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan di lapangan tentang sanksi maupun denda.

2. Penelitian dengan judul “Evaluasi Program Pengelolaan Bank Sampah Unit Mawar Merah di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar” oleh Husnul Khatimah (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan terkait program pengelolaan bank sampah yang disesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 terhadap kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Bank Sampah menjadi terobosan baru dalam hal upaya menangani masalah sampah di

Kota Makassar, dimana sebelumnya pengelolaan sampah dilakukan hanya sebatas kumpul-angkut-buang. Lebih lanjut, dalam melakukan proses evaluasi pelaksanaan program bank sampah Mawar Merah sendiri didasarkan pada indikator Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah pasal 5, yaitu (1) Pemilihan sampah, dimana pengelola bersama dengan masyarakat telah melaksanakan pemilihan sampah berdasarkan jenisnya, (2) Penyerahan sampah, dimana pelayanan kepada masyarakat selaku nasabah telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang dari Pusat, (3) Penimbangan sampah, dimana para petugas yang ada di bank sampah telah melaksanakan penimbangan sampah secara intens, (4) Pencatatan, dilakukan sesuai kaidah tata cara yang diperoleh dari hasil penimbangan yang dilakukan sebelumnya, (5) Hasil penjualan sampah yang diserahkan, kemudian dicatat di buku tabungan (rekening), dalam hal ini petugas melakukan pencatatan langsung hasil timbangan ke dalam sebuah buku rekening untuk kemudian dikonversikan ke dalam bentuk rupiah, (6) Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pengelola bank sampah, dalam indikator ini pengelola memperoleh keuntungan dari harga sampah, baik sampah bersih maupun kotor untuk biaya operasional, (7) Pengangkutan sampah ke bank sampah pusat, dimana pelaksanaannya telah maksimal, dibuktikan dengan tumpukan sampah yang berkurang. Adapun manfaat yang dirasakan dapat dilihat bukan dari segi lingkungan

saja, melainkan juga berdampak pada kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat.

3. Penelitian dengan judul “Evaluasi Program Pengolahan Bank Sampah di TPS 3R KSM Intan Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Deli Serdang” oleh Ayu Wandira (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi Program Pengolahan Bank Sampah TPS 3R KSM Intan Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Deli Serdang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi dilakukan dengan melihat pada indikator proses, manfaat, serta dampak. Dalam indikator proses, program pengolahan bank sampah telah berjalan dengan baik, masyarakat telah mengikuti 7 proses yang ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R, mulai dari pemilahan sampah yang dilakukan sesuai dengan jenis sampah serta dibersihkan, penyerahan sampah yang sudah sesuai dengan tata cara yang berlaku, penimbangan rutin oleh petugas, pencatatan sesuai dengan perolehan hasil penimbangan, hasil penjualan sampah yang dimasukkan ke dalam buku tabungan, bagi hasil antara pengolah dengan penabung, serta pengangkutan sampah yang telah dilaksanakan secara optimal. Manfaat yang dapat dirasakan adalah berupa manfaat dalam aspek sosial, ekonomi serta lingkungan, sementara dampak yang terjadi yaitu masyarakat yang kini telah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi lingkungan, khususnya masalah persampahan.

4. Penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Program Bank Sampah Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018” oleh Dinda Shauma Jadida (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan evaluasi implementasi dari program bank sampah dalam pengelolaan lingkungan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2018. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan secara signifikan dan adanya peningkatan hal positif terhadap pengelolaan lingkungan di Kota Yogyakarta. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar untuk mengurangi sampah. Dalam menganalisis, penulis memegang konsep evaluasi sebagai acuan dalam penelitian, yang terdiri atas beberapa indikator yaitu (1) Kelembagaan, dimana perspektif kelembagaan dalam program bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan tata cara yang berlaku, (2) Pembiayaan, dimana dalam indikator ini yang menjadi pihak pelaku adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang secara keseluruhan kegiatannya sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan peningkatan bank-bank sampah yang semakin mandiri. (3) Peraturan/regulasi, dimana kehadiran peraturan yang mendukung program bank sampah dapat mendorong keinginan untuk meningkatkan potensi dalam melaksanakan setiap proses pada program bank sampah. (4) Peran serta masyarakat, dimana masyarakat telah terlibat aktif dalam program bank sampah yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Lingkungan

Hidup Yogyakarta, selain itu masyarakat juga telah diberikan keleluasan dalam mengurus bank sampah. (5) Teknik operasional, program bank sampah di Yogyakarta telah didukung oleh fasilitas yang cukup lengkap untuk memudahkan prosesnya. Dari kelima indikator tersebut, aspek kelembagaan dan peraturan menjadi dua aspek yang telah terlaksana dengan cukup baik.

5. Penelitian dengan judul “*Screening* dan Evaluasi Program Bank Sampah Kota Yogyakarta” oleh Mulasari et al (2020)

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa *screening* keberlangsungan bank sampah Kota Yogyakarta yang mencakup jadwal kegiatan pelayanan nasabah, pendidikan sumber daya manusia, peran PKK, sosialisasi bank sampah, jumlah pengelola, keberadaan bangunan di bank sampah Kota Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R. Evaluasi program bank sampah Kota Yogyakarta dilakukan dengan melihat (1) Kondisi fisik bank sampah, yang mana dari 75 bank sampah, sebesar 72% memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan standar di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI NO. 13 Tahun 2012. (2) Manajemen bank sampah, dimana dari 75 bank sampah, hanya sebesar 34,7% bank sampah yang manajemen organisasinya berada pada kategori baik dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku, namun demikian sebanyak 56% manajemen organisasinya berada pada kategori cukup. (3) Pemberdayaan masyarakat, dimana dari 75

bank sampah yang ada, terdapat 32% pemberdayaan dalam kondisi baik, sementara sebesar 64% pemberdayaan masyarakat terbilang cukup.

6. Penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bank Sampah di Propinsi DKI Jakarta” oleh Ahmad (2022)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bank sampah yang diteliti, antara lain Bank Sampah Rawajati di Jakarta Selatan, Bank Sampah Malaka Sari di Jakarta Timur, Bank Sampah Karya Peduli di Jakarta Utara, serta Bank Sampah Rizkiku di Jakarta Pusat. Pembahasannya sendiri dilaksanakan dengan mengklasifikasikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing bank sampah. Kegiatan ini mencakup beberapa aspek yang menjadi indikator seperti adanya keikutsertaan masyarakat selaku nasabah bank sampah, hasil produksi dan distribusi kompos, pengelolaan sampah, serta kontribusi pemerintah dalam menopang bank sampah. Dari keempat bank sampah tersebut, masih terdapat beberapa masalah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program bank sampah, mulai dari adanya masalah keuangan, partisipasi masyarakat yang semakin menurun, kesulitan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi hasil produksi bank sampah, serta lahan lokasi bank sampah yang kepemilikannya masih bermasalah. Untuk mengatasi masalah ini maka digunakan alternatif dengan mengikutsertakan peran Perguruan Tinggi sebagai pihak pendamping bank sampah, yang juga menjadi bagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

7. Penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja dan Keberlanjutan Program Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R” oleh Triana & Sembiring (2019)

Hasil penelitian diperoleh bahwa standar operasional prosedur unit bank sampah menjadi variabel yang mempengaruhi seluruh kategori unit bank sampah, dimana proses kegiatannya disesuaikan dengan karakter dari masing-masing kategori unit bank sampah. Berlandaskan pada hasil perolehan rekapitulasi persentase pengurangan sampah dapat dijelaskan bahwa untuk lokasi RW 03 Kelurahan Utama, DPRD Cimahi dan Puskesmas Padasuka memiliki nilai diatas dibawah 25% (tidak efektif) namun pada SD Cimahi Mandiri 2 memiliki persentase pengurangan sampah dari adanya program unit bank sampah sebesar 45,24 % (kurang efektif). Terkait dengan hasil studi kelayakan ekonomi skenario 1 dan 2 diperoleh nilai untuk semua kategori yakni  $BCR > 1$  (layak) kecuali untuk kategori fasilitas umum (Puskesmas Padasuka) dengan nilai  $BCR < 1$  (tidak layak). Kajian tentang SWOT diperoleh bahwa posisi program unit bank sampah berada pada kuadran I dengan posisi yang memiliki keuntungan, namun demikian masih memerlukan perbaikan-perbaikan dalam pengembangam program di masa depan sehingga keberlanjutan program serta kinerja unit bank sampah dapat terlaksana dengan baik.

8. Penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah di Kota Mojokerto” oleh Malifah et al (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada pengelolaan program bank sampah di Kota Mojokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Data-data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pada faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdapat pada tiga tempat bank sampah di 3 kecamatan di Kota Mojokerto, dengan jumlah sebanyak 25 bank sampah. Data yang diperoleh tersebut nantinya akan dianalisis dengan memanfaatkan SWOT. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor kekuatan berada pada angka 1,316, kelemahan sebesar 1,361, peluang sebesar 1.730, dan ancaman sebesar 1.1471. Selisih skor total faktor kekuatan dan kelemahan (-) sebesar 0,045, sedangkan selisih skor total faktor *Opportunity and Treath* (+) sebesar 0,583. Hasil SWOT berada pada posisi kuadran III dengan cakupan nilai *Weakness* adalah - 0,045 dan Nilai *Opportunity* adalah 0,583, sehingga dengan demikian pilihan strategi yang dapat dipakai dalam hal ini adalah Strategi WO (*Weakness- Opportunity*), yaitu strategi yang mencampurkan faktor *weakness* internal dengan *opportunity* eksternal.

9. Penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah” oleh Novalita et al (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini sendiri menggunakan tipe kualitatif deskriptif, dengan teknik yang

dipakai antara lain wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian melihat proses kegiatan evaluasi melalui beberapa indikator, seperti (1) Efektivitas, dimana berdasarkan pada kondisi di lapangan, dapat dilihat bahwa pengelolaan belum berjalan secara efektif, hal ini mengingat masih banyaknya sampah yang berserakan. (2) Efisiensi, indikator ini belum sepenuhnya tercapai, hal ini diperoleh berdasarkan pada pengumpulan data bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahkan belum mengenal baik program bank sampah beserta prosedur didalamnya, (3) Kecukupan, indikator ini melihat jawaban masyarakat yang turut serta langsung dalam melihat perkembangan pengelolaan sampah yang merata, dimana hasil yang diperoleh adalah belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan sampah yang ada, masalah anggaran, SDM, serta sarana prasarana sampah yang belum mencukupi. (4) Responsivitas, dimana banyak dari masyarakat yang masih belum menanggapi persoalan sampah dan kebersihan. (5) Ketepatan, indikator ini tertuang dalam peraturan daerah dimana kehadirannya menjadi sebuah dasar maupun legalitas pengelolaan sampah. Indikator ketepatan dalam kegiatan evaluasi pengelolaan sampah sudah cukup baik, terlepas masih adanya kelemahan pada sosialisasi, ketersediaan sarana, serta sikap masyarakat.

10. Penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah pada Perumahan Permata Kwangsan *Residence* Kabupaten Sidoarjo” oleh Amalia & Tauran (2023)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sistem tata kelola bank

sampah yang berada di Perumahan Permata Kwangsan *Residence* Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Evaluasi pelaksanaan tata kelola bank sampah dilakukan dengan merujuk pada Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi terdapat indikator-indikator yang dianalisis sebagai berikut. (1) Struktur kelembagaan, yang mana struktur kelembagaan pada Bank Sampah Berkah telah sesuai dengan Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Hal ini dibuktikan dengan peran pengelola Bank Sampah Berkah yang mempunyai kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan tugasnya melalui pembekalan pelatihan bersama Bank Sampah Induk (BSI) Makmur Sejati. (2) Cakupan pelayanan, yang mana masyarakat perumahan telah dilayani dengan baik, hal ini terbukti dari banyaknya nasabah terdaftar yang keseluruhannya berasal dari perumahan. (3) Nasabah, yang mana Bank Sampah Berkah telah menadapat respon dari masyarakat yang merasa puas dengan kehadirannya. (4) Standar Operasional Prosedural (SOP), dimana penilaian indikator SOP dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah yaitu mencakup jam operasional, pelayanan nasabah, penjemputan sampah, jenis sampah, berat minimum, penetapan harga, kondisi sampah,

wadah sampah, sistem bagi hasil. Dari keempat indikator di atas, didapatkan hasil struktur kelembagaan yang memperoleh nilai efektif, cakupan pelayanan dengan nilai merata, nasabah memperoleh nilai responsif, serta indikator SOP dengan nilai yang cukup efisien.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Administrasi dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan tulis atau catat mencatat atau sering juga disebut sebagai kegiatan tata usaha, sementara administrasi dalam arti luas memiliki makna proses koordinasi secara logis dan masuk akal oleh kelompok orang guna tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan (Erika, Revida, 2020). Pengertian publik sendiri secara konsep dipahami sebagai “orang banyak, masyarakat, serta negara”. Namun demikian secara sosiologi istilah publik jauh lebih luas apabila dibandingkan dengan masyarakat (Kadir, 2020). Dengan demikian publik tercipta dari adanya adanya sekelompok orang yang didasari jarak komunikasi, bisa mencakup *communication public* maupun *an interest public* (Syafri, 2012). Caiden dalam (Mindarti, 2016) mengemukakan bahwa administrasi publik mencakup keseluruhan kegiatan administrasi dalam lingkup urusan public (*administration for the public affairs*). Hal ini juga selaras dengan apa yang menjadi ruang lingkup kegiatan *public administration*, yaitu adanya pelaksanaan kepentingan publik (*public interest*) dan masalah publik (*public affairs*) (Mindarti, 2016).

Sama seperti halnya dengan administrasi, konsep dan definisi administrasi publik juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dalam pengertian luas maupun dalam

pengertian sempit. Administrasi publik dalam pengertian luas didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan politik melalui kegiatan yang ada dalam negara (Hadjon, 1994). Hal ini kemudian dilengkapi dengan pernyataan yang mengutarakan bahwa administrasi publik secara luas juga dikatakan sebagai suatu bentuk kerja sama yang ada di dalam 3 wilayah pemerintahan, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Pamudji, 1987). Definisi administrasi publik dalam arti sempit ini sendiri berkenaan dengan adanya pelaksanaan kepentingan maupun urusan publik yang secara operasional pada umumnya lebih dominan dikerjakan oleh *public bureaucracy* di lembaga eksekutif (Mindarti, 2016).

(Chandler dan Plano dalam Keban, 2014) memberikan pengertian administrasi publik sebagai suatu proses dimana setiap personel beserta nilai potensi atau sumber daya yang ada dikoordinasi dan diatur, tujuannya adalah berkaitan dengan kegiatan formulasi, implementasi, sampai pada pengelolaan keputusan dalam sebuah kebijakan. Menurut Barton & Chappel dalam (Stillman, 1991) melihat administrasi publik sebagai aktivitas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh birokrat dengan fokus pada unsur keikutsertaan pemangku kepentingan dalam melayani publik.

Berdasarkan pada pendapat beberapa teori yang telah dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi, kompleks dan dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Administrasi publik pada intinya dapat dipahami sebagai ilmu maupun seni, atau kombinasi kompleks antara teori maupun praktek yang menekankan pemahaman

terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam membangun relasinya dengan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan proses kebijakan publik yang lebih responsif terhadap masalah maupun kebutuhan publik sehingga dapat mencapai tujuan kepentingan bersama.

### **1.5.3 Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma dalam administrasi publik akan sangat bermanfaat karena selain akan diketahui karakteristik administrasi publik, juga akan diketahui lokus maupun fokus bidang ini dipahami (Thoha, 2008). Lokus merupakan wadah atau tempat bidang itu berada, sedangkan fokus merupakan persoalan *what of the field* (apa yang ada di lapangan) serta metode apa yang digunakan (Tumbel, 2023). Dalam perkembangannya, administrasi publik telah mengalami pergeseran paradigma yang menandai bahwa telah terjadi *anomalies* beberapa kali, yang oleh sebab itu administrasi publik disebut sebagai disiplin ilmu yang sifatnya dinamis. Pergeseran paradigma administrasi publik terlihat dari adanya pergantian perspektif yang lama ke yang baru oleh beberapa ahli. Pergeseran paradigma ini sudah berlangsung mulai dari kemunculan teori-teori klasik, neo klasik, hingga teori-teori kontemporer (Banga, 2018). Berikut merupakan esensi dari paradigma yang diuraikan (Nicholas Henry dalam Taufiqurokhman et al., 2021).

#### **a. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi Publik (1900-1926)**

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White merupakan tokoh penting yang ada dalam paradigma pertama. Paradigma ini berfokus pada persoalan-persoalan organisasi yang diikuti dengan penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Peran administrator

dalam paradigma ini hanya sebagai alat pemerintah, yang mana campur tangan para-administrator dianggap tidak diperlukan. Administrator hanya memusatkan pada pelaksanaan kebijakan atau keputusan politik. Bisa dikatakan bahwa paradigma ini menekankan pada aspek lokusnya saja, yaitu birokrasi pemerintahan.

b. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Tokoh dalam paradigma ini adalah Gulick dan Urwick, Willoughby, F.W. Taylor, serta Henry Fayol. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh manajemen klasik, dimana prinsip-prinsip manajemen seperti Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling menjadi fokus administrasi yang berlaku secara universal, baik dalam organisasi pemerintah serta pada lingkungan budayanya (dapat diterapkan dimana saja). Dalam paradigma ini aspek lokus kurang mendapat perhatian.

c. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Tokoh dalam paradigma ini adalah Nicholas Henry. Kemunculannya berawal dari adanya kritikan yang memandang bahwa pemisahan administrasi publik dan politik yang tidak realistis, teori administrasi publik yang juga sebenarnya adalah teori politik, serta prinsip-prinsip administrasi yang tidak berlaku secara universal. Dengan adanya kritikan ini maka lokus administrasi publik kembali kepada birokrasi pemerintahan, Fokus dalam paradigma ini sendiri menjadi kabur karena prinsip administrasi yang dianggap memiliki banyak kelemahan, sementara ilmu politik semakin dominan dalam dunia administrasi publik.

d. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Tokoh paradigma ini adalah Henderson, Caldwell, dan Thompson. Dalam paradigma ini aspek fokus sangat diperhatikan, bahkan mulai muncul kesadaran untuk mengadopsi disiplin ilmu lain guna melengkapi studi administrasi publik. Paradigma ini menyatakan bahwa administrasi menggunakan prinsip manajemen yang dipengaruhi berbagai faktor, kemudian dikembangkan secara ilmiah melalui psikologi sosial serta analisis system (kebijakan) untuk melengkapi. Hal ini juga yang kemudian berdampak pada meluasnya ruang lingkup yang sebelumnya berkenaan dengan birokrasi pemerintahan saja menjadi kepentingan masyarakat secara luas.

e. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya bukan hanya sebatas ilmu murni semata tetapi juga berfokus pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik dalam menjawab segala persoalan *public interest* (kepentingan publik).

f. *Paradigm of Public Administration as Good Governance* (1990)

Paradigma ini menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik akan tercapai apabila diikuti oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya tidak hanya bergantung atau berfokus pada peran pemimpin negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar, atau pihak swasta/privat yang bisa menyediakan atau mempersiapkan lapangan atau

proyek pekerjaan, melainkan juga bergantung pada masyarakat sipil yang mengakomodasi berbagai interaksi sosial dan politik, serta memberikan ruang gerak bagi kelompok dalam sebuah golongan di masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial, ekonomi maupun politik (Angga, 2022).

#### **1.5.4 Kebijakan Publik**

Pada dasarnya kebijakan publik dipahami sebagai salah satu tindakan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, baik dalam bentuk pengaturan ataupun keputusan (Alamsyah, 2016). Dalam hal ini, kebijakan publik adalah hasil dari adanya mekanisme politik yang digerakkan oleh sebuah sistem administrator yang di dalamnya tertanam prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara (Anggara, 2014). Dalam penerapannya, kebijakan publik memiliki dependensi dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Menurut (Dye dalam Kartasasmita, 1995) kebijakan publik merupakan segala hal yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah (birokrasi) (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam prosesnya tidak hanya mengacu pada upaya pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah terkait masalah, tetapi juga apa yang menjadi penyebab serta bagaimana pengaruh maupun dampak dari kebijakan publik tersebut (Anggara, 2016). Konsep ini kemudian dipertegas oleh (Fadli, 2021) yang berpendapat bahwa gejala atau fenomena yang ada di dalam kebijakan publik bukan saja berada pada proses

formulasi ataupun metode substansi kebijakan publik dilaksanakan, melainkan juga meliputi hal-hal yang berpengaruh sebagai implikasi yang muncul dari sebuah kebijakan publik.

Pemikiran menurut (Anderson dalam Islami, 2000) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah. Kebijakan publik dalam hal ini senantiasa dilakukan untuk mengintervensi kehidupan publik, dalam rangka menumbuhkan taraf kehidupan publik itu sendiri (Nugroho, 2018). Berdasarkan pada pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rancangan atau aturan yang dilembagakan guna menjawab berbagai masalah publik, yang tentunya dapat dipandu oleh sebuah konsepsi dan dilaksanakan dalam sebuah program sebagai rangkaian tindakan atau peristiwa dimana tindakan tersebut haruslah mengandung tujuan agar dapat mencapai keputusan yang baik secara mayoritas (kepentingan publik).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut (William Dunn dalam Sore & Sobirin, 2017) adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Agenda

Tahapan ini merupakan waktu dimana para aktor diberi ruang untuk menguraikan dan menganalisis berbagai masalah publik untuk kemudian dimasukkan menjadi sebuah prioritas dalam agenda publik (*policy problem*). Dalam tahapan penyusunan agenda sebaiknya dilaksanakan dengan melihat kebutuhan yang paling penting, serta adanya partisipasi seluruh aktor/ stakeholder.

## 2. Formulasi Kebijakan

Tahapan ini merupakan tahap dimana aktor pembuat kebijakan membahas kembali masalah kebijakan untuk kemudian dicari solusi terbaik melalui berbagai alternatif kebijakan yang ada. Setiap alternatif kebijakan dalam hal ini bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

## 3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tahapan ini merupakan tahap dimana diberikannya kekuasaan atau pengaruh pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Legitimasi erat kaitannya dengan seberapa jauh masyarakat mau menyetujui dan mengakui kekuasaan atau kebijakan yang dipilih oleh pimpinan (aktor kebijakan).

## 4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Tahapan evaluasi atau penilaian kebijakan merupakan kegiatan yang melibatkan estimasi yang meliputi esensi, pelaksanaan, dan pengaruhnya. Penilaian kebijakan dalam hal ini dapat dilihat sebagai sebuah kegiatan fungsional, yang bukan hanya dilaksanakan pada akhir melainkan dilaksanakan pada semua proses kebijakan.

### **1.5.5 Evaluasi Kebijakan Publik**

#### **1. Konsep Evaluasi Kebijakan**

Konsep evaluasi dalam arti sempit berkenaan dengan proses untuk menghasilkan informasi terkait nilai atau manfaat dari suatu kebijakan (Firyal & Widya, 2018). Menurut (Patton & Sawicki, 1986) evaluasi merupakan kegiatan sistematis yang berkaitan dengan data-data informasi

serta dampak yang diciptakan suatu program dalam kebijakan, untuk kemudian memunculkan analisis spesifik guna menilai program di dalam kebijakan itu sendiri. Evaluasi dalam kebijakan publik merupakan istilah yang merujuk pada tata cara analisis yang dilakukan untuk dua hal. Pertama, sebagai sarana dalam menilai program kebijakan guna memperoleh seluruh data kegiatan dan informasi yang berkenaan dengan keberhasilan proses maupun hasilnya, kedua, sebagai tahapan siklus kebijakan publik yang dalam prosesnya menekankan pada pelaporan kembali informasi pada sebuah kebijakan (Hellmut, 2003).

Deskripsi utama dari evaluasi kebijakan yaitu adanya tuntutan yang sifatnya evaluatif, dimana yang menjadi pertanyaan utama bukan lagi terkait fakta maupun aksi, melainkan nilai dan manfaat (William N et al., 2003). Evaluasi kebijakan publik adalah proses terakhir dalam sebuah kebijakan publik untuk melihat sekaligus menilai sejauh mana kebijakan publik dapat berjalan secara efektif serta mencapai tujuannya (Joko, 2020). Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Purwo, 2010) yang menyatakan bahwa definisi evaluasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan penilaian terkait efektivitas dan keberhasilan program dalam sebuah kebijakan, sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi kebijakan dalam hal ini mempersoalkan bagaimana implementasi suatu kebijakan dikaji kembali untuk kemudian diidentifikasi hasil serta yang terpenting nilai atau dampaknya (Muchlis, 2014).

Berdasarkan pada pendapat beberapa ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu rangkaian aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan untuk menemukan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses implementasi secara menyeluruh, untuk nantinya dilakukan proses menilai hasil serta dampak atau manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, yang mana penilaian tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Karakteristik evaluasi kebijakan dapat dilihat dari penemuan hal strategis yang bertujuan meningkatkan kinerja kebijakan, peran fungsi evaluator yang mampu menempatkan diri, adanya tanggung jawab atas prosedur evaluasi, serta pelaksanaannya yang meliputi rumusan, implementasi, lingkungan serta keberhasilan kebijakan. Dengan adanya kriteria di atas maka akan diketahui empat aspek penting yang juga menjadi pendorong dilakukannya evaluasi kebijakan (Ravyansah et al., 2022). Aspek tersebut diantaranya pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, konsekuensi kebijakan serta efektivitas dan keberhasilan kebijakan (Annas, 2017).

## **2. Fungsi Evaluasi Kebijakan**

Fungsi utama dilaksanakannya evaluasi adalah pertama, untuk memberikan informasi yang kuat dan dapat dipegang dalam menilai kinerja atau keberhasilan suatu program atau kebijakan, yakni bagaimana kebutuhan, nilai, dan peluang telah tercapai dengan adanya proses tindakan publik. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada uraian kritis tentang

nilai-nilai yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran (D. S. K. Dewi, 2022). Fungsi evaluasi kebijakan publik menurut (Putra, 2003) meliputi tiga hal utama, diantaranya (i) membagikan serta memberikan informasi yang benar tentang kinerja dan atau keberhasilan suatu kebijakan; (ii) mengukur kesesuaian tujuan dan sasaran dengan permasalahan yang sedang dibahas; (iii) memberikan kontribusi pada kebijakan lain, terutama pada kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan metodologi analisis kebijakan.

Menurut (Nugroho, 2014), fungsi evaluasi kebijakan publik mencakup empat fungsi pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Eksplanasi, yaitu fungsi evaluasi untuk melakukan identifikasi terkait persoalan atau masalah, kondisi serta pihak yang terlibat dalam mendorong berhasil atau gagal nya sebuah kebijakan.
2. Kepatuhan. yaitu fungsi evaluasi untuk mengamati berbagai tindakan para pihak atau aktor yang sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, yaitu dengan adanya evaluasi maka dapat dilihat apakah sasaran output atau hasil sudah tepat, atau apakah terdapat penyimpangan di dalamnya.
4. Akunting, dimana dengan adanya evaluasi maka segala pengaruh maupun dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut dapat diketahui.

### 3. Model Evaluasi Kebijakan

Pandangan tentang model dalam melakukan evaluasi kebijakan dikemukakan oleh (Evert Vedung dalam Kurniawan & Sutawijaya, 2023) antara lain sebagai berikut.

1. *Goal Attainment Model*, yaitu model evaluasi yang mengamati aspek tercapainya tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Model ini menggunakan dua metode, yakni *goal attainment evaluation* (tata cara untuk melihat sudah atau belum tercapainya tujuan), serta *intervention impact assessment* (tata cara untuk melihat ada atau tidaknya dampak yang diinginkan).
2. *Side Effect Model*, yaitu model evaluasi yang dilakukan dengan memperhatikan konsekuensi atas pelaksanaan kebijakan publik, yang mana pengaruh atau efek tersebut diterima oleh pihak yang bukan menjadi sasaran kebijakan, dan efek yang ditimbulkan pun dapat berupa efek samping yang sifatnya positif atau pun negatif.
3. *Relevance Model*, yaitu model evaluasi yang memperkirakan apakah campur tangan dalam sebuah kebijakan dapat menyelesaikan masalah publik atau tidak. Kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah publik.
4. *Client-Oriented Model*, yaitu model evaluasi yang menitikberatkan apakah kebijakan publik mampu mengikuti kemauan dan harapan klien selaku masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintah. Indeks

Kepuasan Masyarakat (IPM) menjadi salah satu sarana penting dalam melakukan evaluasi ini.

5. *Stakeholder Method*, yaitu model evaluasi yang memfokuskan pada pemenuhan harapan berbagai aktor (masyarakat, pengusaha, aktor pemerintah, dan sebagainya) yang memiliki kepentingan dalam proses kebijakan, mulai dari tahap formulasi, implementasi hingga evaluasi.
6. *Collegial Method*, yaitu model evaluasi kebijakan yang mana performa dan pencapaian keberhasilan kebijakan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah dinilai oleh instansi lain yang menjadi mitranya.

#### **4. Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

Pendekatan evaluasi kebijakan menurut (Dunn dalam Silitonga, 2022) dibedakan menjadi tiga, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, serta evaluasi keputusan teoritis.

1. Evaluasi Semu, adalah pendekatan yang memakai metode deskriptif guna menghasilkan keterangan berupa informasi secara valid terkait *output* atau hasil kebijakan, tanpa adanya usaha untuk mempertanyakan nilai dan manfaat hasil tersebut terhadap kelompok atau individu masyarakat keseluruhan.
2. Evaluasi Formal, adalah pendekatan yang memakai metode deskriptif dalam rangka menghasilkan keterangan berupa informasi valid serta dapat dipercaya tentang *output* atau hasil kebijakan, yang mana evaluasi *output* dilakukan dengan berpatokan pada tujuan program

dalam kebijakan yang telah diberitahukan secara formal oleh aktor-aktor terkait

3. Evaluasi Keputusan Teoritis, adalah pendekatan yang memakai metode deskriptif guna menghasilkan keterangan berupa informasi yang valid sekaligus kredibel terkait *output* atau hasil kebijakan yang secara tegas dinilai oleh para aktor kebijakan

Penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

<b>Pendekatan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Asumsi</b>	<b>Bentuk Utama</b>
Evaluasi semu	Untuk menciptakan keterangan informasi yang berdasarkan data dan fakta mengenai output atau hasil dari suatu kebijakan	Standar atau patokan nilai dan manfaat dapat dibuktikan dengan sendirinya ( <i>self evident</i> ) tanpa adanya hal yang memicu perbedaan pendapat (kontroversial)	Pemeriksaan sosial Akuntansi system sosial Sistensis riset dan praktik Eksperimentasi sosial
Evaluasi formal	Untuk memperoleh informasi yang kredibel dan benar tentang output atau hasil kebijakan yang secara resmi dipublikasikan sebagai arah serta tujuan suatu program dalam kebijakan	Sasaran dan tujuan dari aktor dan administrator selaku pengambil keputusan kebijakan diberitahukan adalah tolak ukur yang tepat dari nilai dan manfaat	Evaluasi eksperimental Evaluasi hasil ret-rospektif Evaluasi Kembangan Evaluasi proses retrospektif
Evaluasi keputusan teoritis	Untuk mendapatkan informasi yang meyakinkan dan benar adanya, yaitu	Sasaran dan tujuan dari para pihak yang diberitahukan	Penilaian terkait dapat atau tidaknya dievaluasi

<b>Pendekatan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Asumsi</b>	<b>Bentuk Utama</b>
	terkait output atau hasil kebijakan dimana bagi para aktor kebijakan informasi ini sangat penting dan secara nyata diinginkan	secara resmi maupun tidak adalah tolak ukur yang tepat dari nilai dan manfaat	Analisis utilitas multiatribut

Sumber: (Dunn dalam Silitonga, 2022)

## 5. Indikator Evaluasi Kebijakan

Untuk melakukan evaluasi kebijakan perlu memperhatikan beberapa indikator untuk mengukur evaluasi tersebut (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Secara umum, pengukuran evaluasi kebijakan mencakup empat indikator sebagai berikut (Bridgman Peter & Davis, 2000., Badjuri & Yuwono, 2002))

1. Indikator *input*, yaitu pengukuran evaluasi yang berfokus terhadap aspek sumber daya yang mendorong dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Aspek yang dimaksud dalam hal ini mencakup sumber daya manusia (SDM), materi, sarana prasarana (infrastruktur), serta aspek pendukung lainnya.
2. Indikator *proses*, yaitu pengukuran evaluasi yang dilihat dari adanya pelayanan yang diberikan langsung bagi masyarakat melalui proses modifikasi dan transformasi sebuah kebijakan. Indikator proses mencakup beberapa aspek diantaranya aspek efektivitas serta efisiensi dari tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
3. Indikator *output* (hasil), yaitu pengukuran evaluasi yang memberikan perhatian pada hasil yang diperoleh dari penerapan sistem dalam kebijakan publik.

4. Indikator *outcomes* (dampak), yaitu pengukuran evaluasi yang berfokus pada pertanyaan bagaimana perolehan dampak atau manfaat yang dapat diterima langsung oleh masyarakat yang terlibat dalam kebijakan publik.

### **1.5.6 Kajian Tentang Bank Sampah**

#### **1. Konsep Bank Sampah**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, dijelaskan bahwa bank sampah merupakan wadah atau sarana untuk mengurus dan mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, serta pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Pemahaman terkait prinsip 3R sendiri mencakup segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya timbulan sampah (*Reduce*), kegiatan menggunakan kembali sampah yang layak pakai (*Reuse*) dan kegiatan mengolah dan mendaur ulang sampah untuk dijadikan produk lain yang lebih berguna (*recycle*).

Bank sampah dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah).

- a. Pengelolaan sampah, yaitu meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan dengan cara kegiatan pemanfaatan kembali sampah, sementara penanganan sampah dilaksanakan dengan cara pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan atau pengolahan sampah.
- b. Fasilitas bank sampah, dikelompokkan berdasarkan pada kelompok jenis bank sampah, meliputi Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU)
- c. Tata kelola bank sampah, dibedakan atas jenis bank sampah, meliputi Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU)

## **2. Tujuan dan Manfaat Program Bank Sampah**

Segala kegiatan program bank sampah dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat, dengan seluruh sistem fungsionalnya dijalankan oleh masyarakat. Bank sampah dalam hal ini juga menawarkan nilai dan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Utami, 2013). Berdirinya bank sampah bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli masyarakat terkait persoalan sampah, untuk memperbaharui sikap dan pola pikir masyarakat bahwa sampah memiliki nilai manfaat, apabila diolah dan didaur ulang (Setiawan, 2015). Manfaat bank sampah, yaitu menekan jumlah sampah di lingkungan, mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, hijau, dan bersih, meningkatkan kreativitas masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah, serta meningkatkan pendapatan ekonomi nasabah yang diperoleh dari penghasilan kegiatan pengumpulan dan penyetoran sampah dalam bentuk rekening (tabungan).

### **3. Tata Cara Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah**

Berkaca pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah dilaksanakan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan, hal ini sejalan dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Jenis sampah untuk dikelola di Bank Sampah sendiri terdiri atas Sampah Rumah Tangga, serta Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Proses kegiatan pengurangan di Bank Sampah dilaksanakan melalui aktivitas daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah, adapun proses kegiatan penanganan dilaksanakan melalui beberapa aktivitas, mulai dari kegiatan pemilahan, pengangkutan, serta pengolahan sampah.

Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah tata cara pengelolaan sampah di Bank Sampah dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan sebagai berikut.

#### **1. Pengurangan sampah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan kembali sampah yakni dengan melakukan kegiatan daur ulang secara keseluruhan atau sebagian sampah untuk tujuan dan fungsi tertentu tanpa terlebih dahulu disertai proses pengolahan. Pemanfaatan kembali sampah

dilakukan terhadap jenis sampah yang secara fungsinya memang dapat digunakan kembali, seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.

## 2. Penanganan sampah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pemilahan, kegiatan pengumpulan, serta kegiatan pengolahan. Lebih lanjut, kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut,

- a. Pemilahan sampah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada sumber sampah dan fasilitas pemilahan sampah, untuk kemudian dilakukan pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya
- b. Pengumpulan sampah, dilakukan guna memindahkan sampah dari sumber sampah (rumah tangga) menuju bank sampah.
- c. Pengolahan sampah, yaitu kegiatan yang membawa perubahan pada karakteristik, komposisi serta jumlah sampah sehingga fenomena timbulan sampah dapat berkurang. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengomposan, daur ulang materi, maupun daur ulang energi

## 4. Kendala Kebijakan Pengelolaan sampah pada Bank Sampah

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dipakai sebagai bahan acuan penulis dalam rangka melaksanakan penelitian, menurut (Pajaryuanda, 2019) terdapat beberapa kendala yang turut berpengaruh dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah, antara lain:

1. Kurangnya pendanaan dalam pengelolaan sampah, hal ini terlihat dari angkutan sampah yang kurang sesuai dengan prinsip dan standar yang

tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan

2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dalam mengelola sampah yang ada di bank sampah
3. Kesadaran masyarakat yang semakin menurun dalam hal menjaga lingkungan dari sampah yang terus bertambah jumlahnya

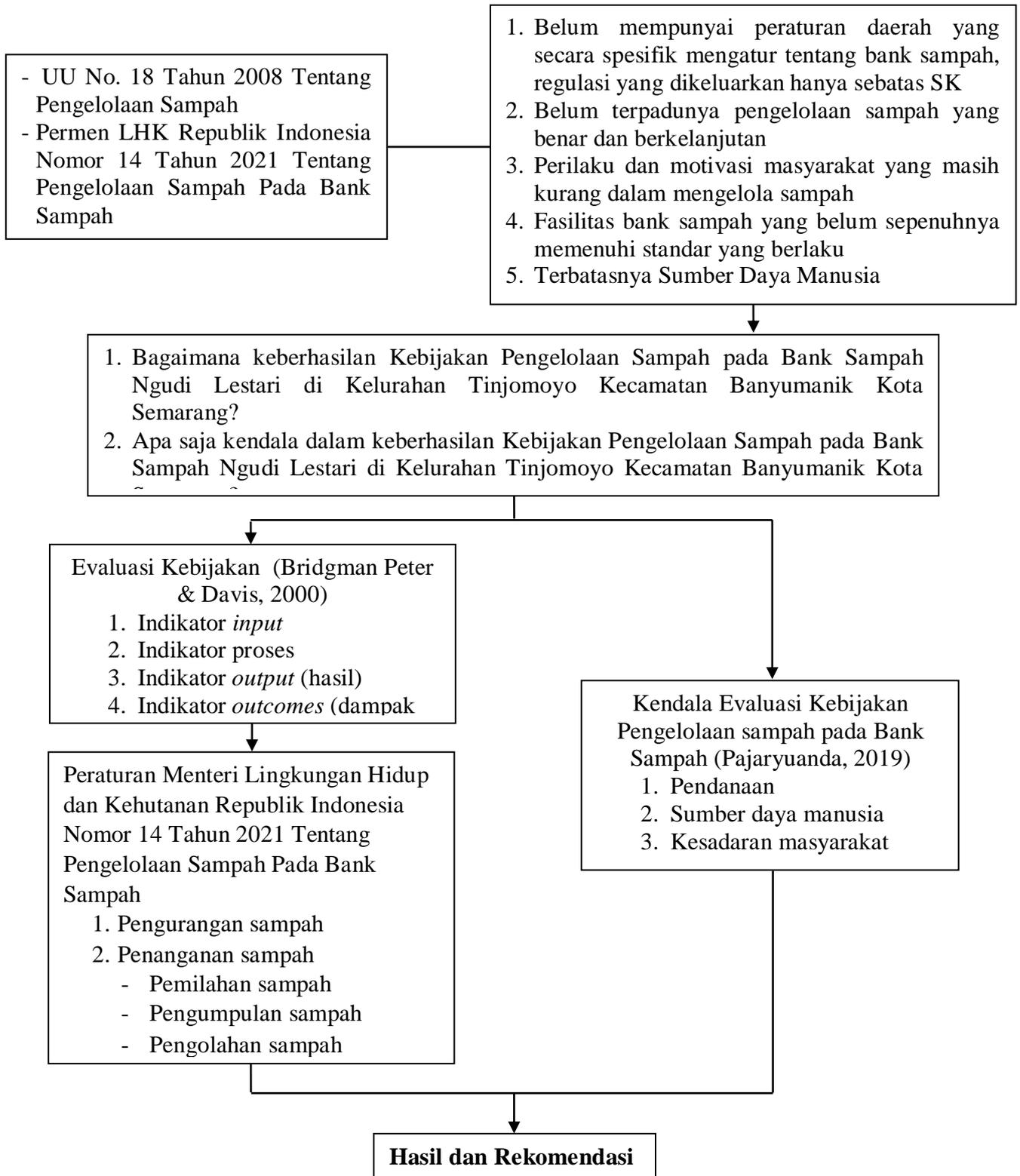
Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, 2022), beberapa kendala dalam pengelolaan sampah pada bank sampah antara lain sebagai berikut.

1. Pelatihan yang berkaitan dengan tata kelola sampah pada bank sampah masih kurang, sehingga diperlukan pendampingan dan pengawasan secara intens dan terus menerus terhadap bank sampah guna memastikan prosesnya berjalan secara tepat dan dapat mencapai tujuannya
2. Kegiatan tata kelola dan kinerja bank sampah yang sangat beragam dan bergantung dari keterlibatan masyarakat dan kapasitas manajerial pengelola atau pengurus bank sampah, hal ini disebabkan karena sebagian besar bank sampah berdiri atas ide atau gagasan dari masyarakat di sekitar wilayahnya sehingga pengelolaannya pun dilakukan secara swadaya, sesuai kebiasaan dan perilaku masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil konsep kendala evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah dengan mengacu pada penelitian terdahulu oleh (Pajaryuanda, 2019).

### 1.5.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.4 Kerangka Berpikir



## 1.6 Oprasionalisasi Konsep

### 1.6.1 Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik adalah suatu rangkaian aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan untuk menemukan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan secara menyeluruh, untuk kemudian dilakukan proses menilai hasil serta manfaat yang diperoleh dari adanya kebijakan tersebut. Berikut indikator evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1. Indikator *input* adalah pengukuran evaluasi yang berfokus terhadap aspek sumber daya yang mendorong sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dalam penelitian ini, gejala yang diamati mencakup:
  - a. Sumber Daya Manusia (SDM), baik pengurus bank sampah maupun nasabah serta *stakeholder* yang terlibat pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
  - b. Materi, yaitu berkaitan dengan anggaran-anggaran guna mendukung aktivitas pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
  - c. Sarana Prasarana, yaitu berkenaan dengan segala fasilitas yang diperlukan dalam menunjang aktivitas serta mempermudah pekerjaan

atau kegiatan pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

d. Aspek pendukung lainnya, yaitu aspek lain yang memiliki pengaruh dalam proses kegiatan pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

2. Indikator *proses* adalah pengukuran evaluasi yang dilihat dari adanya pelayanan yang diberikan langsung bagi masyarakat melalui proses modifikasi dan transformasi dalam sebuah kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dalam penelitian ini gejala yang diamati terdiri atas beberapa aspek yang prosesnya disesuaikan dengan standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, yaitu

a. Pengurangan sampah adalah kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk tujuan dan fungsi tertentu tanpa disertai proses pengolahan. Kegiatan ini meliputi:

- Kegiatan pembatasan sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
- Penggunaan kembali sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
- Pendaoran ulang sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

- b. Penanganan sampah adalah proses kegiatan bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang dimulai dari pemilahan, pengumpulan, sampai pada pengolahan.
  - Pemilahan sampah, adalah kegiatan yang dilaksanakan pada sumber sampah dan fasilitas pemilahan sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, untuk kemudian dilakukan pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya
  - Pengumpulan sampah adalah proses pemindahan sampah dari sumber sampah (rumah tangga) menuju bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
  - Pengolahan sampah adalah kegiatan yang membawa perubahan pada karakteristik komposisi serta jumlah sampah, sehingga fenomena timbulan sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dapat berkurang.
3. Indikator *output* (hasil) adalah pengukuran evaluasi yang memberikan perhatian pada hasil yang diperoleh dari penerapan program dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Gejala yang diamati dalam penelitian ini meliputi:
  - a. Jumlah partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang tercatat sebagai nasabah di bank sampah Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

- b. Kualitas pelayanan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
  - c. Target kinerja kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah
  - d. Hasil produksi sampah yang berhasil diolah
  - e. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat
4. Indikator *outcomes* adalah pengukuran evaluasi yang berfokus pada bagaimana perolehan dampak atau manfaat yang dapat diterima langsung oleh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Gejala yang diamati yaitu:
- a. Perolehan pelayanan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
  - b. Manfaat yang diterima masyarakat luas yang terkena kebijakan
  - c. Dampak terhadap kelompok non sasaran
  - d. Dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan

### **1.6.2 Kendala Evaluasi Kebijakan**

Kendala evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah persoalan atau rintangan yang dapat menghambat berjalannya kegiatan evaluasi. Indikator kendala evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1. Pendanaan, yaitu terlihat dari fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan bank sampah yang kurang memadai, mulai dari kantor atau ruang pelayanan

nasabah, hingga fasilitas pemilahan sampah, fasilitas pengumpulan sampah, serta fasilitas penyimpanan sampah.

2. Sumber daya manusia, yaitu berkaitan kesulitan dalam melakukan regenerasi kepengurusan.
3. Kesadaran masyarakat, yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang cenderung menurun.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Argumentasi adalah suatu bentuk karangan yang menunjukkan benar atau tidaknya sebuah penjelasan atau pernyataan. Tulisan argumen pada umumnya memakai skema untuk memberikan keyakinan kepada pembaca atas validitas dari sebuah pernyataan (*statement*) (Alwasilah, 2005). Menurut (Nursisto, 1999) argumentasi merupakan buah pikir yang berusaha dalam memberikan alasan untuk mendukung atau melawan suatu pernyataan pendapat. Pokok dari argumentasi sendiri mencakup argumen yang berdasarkan pada fakta serta alasan yang dapat membuat orang lain percaya atas apa yang dinyatakan adalah sebuah kebenaran.

Argumen menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian. Argumen penelitian adalah suatu bentuk retorika yang di dalamnya terdapat usaha untuk memberikan pengaruh sikap atau pendapat kepada orang lain, dalam hal ini penulis memperoleh kepercayaan dari pembaca atas suatu fenomena yang dibahas oleh penulis (Keraf, 2004). Penulis dalam penelitian ini mengangkat argumen melalui dua tahapan yakni dengan melalui

survei terhadap berbagai literatur yang ada, kemudian mengkritisnya, adapun tipe argumen yang dikembangkan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Argumen temuan, dimana penulis mengembangkan temuan dengan mendeskripsikan apa yang penulis ketahui saat ini terkait dengan bidang penelitian yang diminati.
- b. Argumen dukungan, dimana penulis menganalisis dan menilai dengan kritis pengetahuan yang didapat dari argument temuan guna menjawab masalah penelitian.

Setelah melakukan kedua tahapan di atas maka penulis melakukan survei dan tinjauan ulang terhadap literatur. Kegiatan ini sendiri meliputi unsur penting mulai dari latar belakang, masalah penelitian, metodologi, sampai pada kesimpulan dan rekomendasi.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian erat kaitannya dengan tata cara, proses, alat, serta tipe penelitian untuk digunakan. Tipe penelitian dalam hal ini dipilih berdasarkan pada kecocokan dengan pendekatan serta metode penelitian yang telah dipilih dan ditetapkan (Ibrahim et al., 2018). Penentuan dari tipe penelitian yang benar sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari tujuan penelitian, masalah yang diangkat, kemampuan penulis, rentang waktu, sarana dan prasarana, serta data yang akan dikumpulkan. (Anwar, 2007).

Ditinjau dari jenis data dan analisisnya, penelitian terbagi ke dalam dua tipe, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif (Jaya, 2020).

## 1. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam temuannya tidak melibatkan prosedur statistik atau metode yang sifatnya kuantifikasi (pengukuran). Tipe penelitian ini digunakan dalam aktivitas penelitian terkait masalah dalam aktivitas atau peristiwa sosial yang berdasarkan pada realitas yang holistik serta memiliki kompleksitas yang cukup rinci (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif berisi data deskriptif berbentuk catatan tingkah laku masyarakat yang diamati (Andra, 2018) sehingga makna dari gejala atau fenomena yang akan diteliti dapat diperoleh (Umrati & Wijaya, 2020).

## 2. Penelitian Kuantitatif

Tipe penelitian yang dalam hasil temuannya memanfaatkan beberapa tata cara statistik atau yang bersifat pengukuran, dimana fokus perhatiannya ada pada fenomena yang memiliki ciri-ciri tertentu dalam kehidupan masyarakat (variabel) yang dalam analisisnya memerlukan teori objektif dengan hasil perhitungan yang bersifat statis dan matematis untuk menganalisis hubungan kausalitas antar variabel (Mardawani, 2020).

Menurut (Ibrahim et al., 2018) tipe penelitian berdasarkan tingkat kedalaman analisisnya terbagi menjadi dua.

### 1. Penelitian Deskriptif

Tipe penelitian yang menjelaskan kegiatan yang terjadi dalam melakukan penelitian. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan serta menganalisis kondisi atau fenomena yang terjadi.

## 2. Penelitian Eksplanatori

Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang memiliki tujuan menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tipe penelitian ini pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana hubungan sebab-akibat diantara variable dalam penelitian serta melakukan pengujian terhadap hipotesis yang sudah disusun sebelumnya (Sugiyono, 2015).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yang ada di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Tipe penelitian deskriptif kualitatif sendiri dilakukan untuk memahami setiap fenomena dari sudut pandang informan yang menjadi partisipan. Penelitian ini juga menyajikan beragam perspektif informan melalui strategi yang sifatnya interaktif mulai dari kegiatan pengamatan secara langsung, wawancara mendalam, studi dokumen serta teknik-teknik pelengkap lainnya. Peneliti dalam hal ini mendeskripsikan fenomena atau *setting* sosial terkait kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo yang tertuang dalam sebuah tulisan naratif atau gambar yang dihimpun berdasarkan fakta melalui kutipan data yang diungkapkan pada saat di lapangan (Warul et al., 2015). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memusatkan perhatian pada makna dibandingkan generalisasi, hal ini karena penulis mengeksplorasikan data secara mendalam (Anggito & Setiawan, 2018). Proses penelitian dalam hal

ini memperhatikan intensitas dalam menganalisis karena penulis ikut terlibat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan penelitian.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Wilayah atau tempat dimana penelitian dilakukan disebut dengan situs penelitian. Situs penelitian dalam penelitian ini sendiri dilakukan di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Lebih tepatnya, penelitian dilakukan di Bank Sampah Ngudi Lestari yang beralamat di Jalan Karangrejo Selatan VI RT 01, RW VII, Kel, Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menurut (Amirin, 1995) adalah tempat dimana suatu keterangan diperoleh penulis. Menurut (Suharsimi, 2009), subjek penelitian didefinisikan sebagai orang, hal atau benda yang menjadi wadah untuk mengumpulkan data dimana fenomena penelitian terjadi. Untuk menentukan subjek penelitian diperlukan beberapa kriteria sebagai berikut (Baswori & Suwandi, 2008).

1. Subjek penelitian dari segi waktu secara intensif telah melekat pada aspek kegiatan yang ingin diteliti.
2. Adanya keterlibatan subjek penelitian tentang kegiatan tersebut.
3. Kecukupan waktu dari subjek penelitian untuk dimintai keterangan berupa informasi.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan informan. Informan di dalam penelitian ini sendiri dipilih berdasarkan pada pertimbangan

tujuan tertentu (*purposive*), yang mana dalam hasil penelitian tidak menggunakan konsep generalisasi ke populasi. Penelitian kualitatif dalam hal ini memberikan penekanan pada kualitas sampel bukan hanya kuantitasnya (Agus, 2006). Penelitian tentang evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomayo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang melibatkan beberapa informan, antara lain:

- Kepala Subbagian Pengelola Informasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
- Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
- Lurah Tinjomoyo;
- Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Tinjomoyo;
- Lembaga Swadaya Masyarakat (*Bintari Foundation*);
- Ketua Bank Sampah Ngudi Lestari;
- Seksi Pemasaran Bank Sampah Ngudi Lestari;
- Nasabah Bank Sampah Ngudi Lestari;
- Masyarakat Umum.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Data merupakan hasil keterangan dari apa yang diperoleh penulis dari subjek penelitian (informan). Menurut (Muhammad, 2009) data adalah keseluruhan informasi terkait sesuatu hal yang erat kaitannya dengan tujuan penulis. Penelitian ini mengklasifikasikan jenis data berdasarkan sumber perolehan serta kemungkinan pengukurannya. Dilihat dari kemungkinan

pengukurannya, jenis data terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif mengacu pada kualitas objek penelitian berupa serangkaian keterangan untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang sedang diteliti, sedangkan data kuantitatif mengacu pada wujud angka (pengukuran) yang terbagi lagi menjadi data nominal dan data kontinum (golongan data yang sifatnya bertingkat).

Jenis data yang dipakai dalam penelitian adalah data kualitatif dengan analisa menggunakan kata-kata berdasarkan informasi yang diperoleh baik melalui wawancara, studi dokumen, studi literatur, maupun observasi untuk menghasilkan suatu pemahaman terkait realitas sosial yang menjadi fenomena penelitian.

### **1.8.5 Sumber Data**

Dalam penelitian ketersediaan sumber data menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih fenomena atau masalah yang akan diteliti. Sumber data yang dimaksud dalam hal ini merupakan informasi darimana data diperoleh. Menurut (Moleaong dalam Sandu & Sodik, 2015) sumber data utama dalam penelitian kualitatif mencakup tampilan yang berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya adalah data pendukung seperti misalnya dokumen dan lain sebagainya. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh (Rukin, 2021).

Sumber data menurut (Mukhtazar, 2020) terdiri dari sumber data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung serta memiliki keaslian karena berasal dari sumber data pertama (tanpa perantara). Data ini dikumpulkan langsung oleh penulis dari orang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menjadi subjek penelitian. Informan tersebut antara lain Kepala Subbagian Pengelola Informasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat Bintari, Lurah Tinjomoyo selaku pemangku wilayah setempat, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemerintahan Kelurahan Tinjomoyo, Pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari yang terdiri dari ketua bank sampah dan seksi pemasaran bank sampah, masyarakat yang merupakan nasabah dari Bank Sampah Ngudi Lestari dan masyarakat umum.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara (sumber kedua) dan bukan merupakan sumber asli yang memuat informasi yang dibutuhkan. Data ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber maupun referensi melalui studi pustaka, seperti dari Buku Pedoman Pelaksanaan Program Bank Sampah, Peraturan atau regulasi dari pusat maupun daerah yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah, data-data yang berasal dari instansi setempat yang memiliki keterkaitan dengan bank sampah, jumlah peserta nasabah serta sumber lain yang sifatnya diperoleh melalui media sosial.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh beberapa data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Juliansyah, 2011). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa teknik seperti teknik observasi, dokumenter, serta komunikasi sebagai solusi atas pemahaman realita sosial (Fischer et al., 2021). Menurut (Cosmas, 2020), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari wawancara, studi dokumen, pengamatan, serta *Focus Group Discussion* (FGD).

Dalam penelitian ini sendiri menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut.

#### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena penelitian (Helen, 2016). Teknik pengumpulan ini dalam penelitian kualitatif menjadi paling umum sekaligus cukup penting dalam memahami serta memperluas pengetahuan terkait fenomena yang diteliti (Michael Quinn, 1990). Observasi dilakukan menurut prosedur tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Observasi dalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada lokasi dimana penulis terlibat secara langsung dengan mengamati lebih lanjut seluruh kegiatan yang ingin diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Bank Sampah Ngudi

Lestari untuk menganalisis keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah yang ada di Kelurahan Tinjomoyo ini.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pemberian sejumlah pertanyaan berbentuk lisan kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait fenomena dalam penelitian (Rahmadi, 2011). Teknik ini dilakukan apabila penulis ingin memperoleh informasi terkait makna subjektif yang dimengerti informan, yaitu berkenaan dengan fenomena yang sedang diteliti (Banister Peter et al., 1994). Jenis wawancara dalam penelitian kualitatif sendiri memiliki banyak istilah, seperti wawancara mendalam, terbuka dan naturalistik. (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Dalam teknik wawancara, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para informan dengan mengacu pada *interview guide* untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pertanyaan yang diajukan kepada informan sendiri memiliki sifat tidak terstruktur dan cenderung bersifat terbuka, hal ini dibutuhkan untuk menciptakan pendapat atau pandangan yang lebih rinci dari para informan.

## 3. Studi Dokumen

Studi dokumen atau yang juga disebut dengan dokumentasi merupakan cara untuk menghimpun data melalui beberapa dokumen baik yang tertulis, dokumen yang terekam (Cosmas, 2020) maupun dokumen

resmi dan dokumen pribadi (Poerwandari, 2007). Dokumen tertulis dapat berbentuk surat atau arsip, laporan, memorial, foto, dan sebagainya, sementara dokumen terekam berbentuk film, foto, rekaman, dan sebagainya (Rahmadi, 2011). Dokumen resmi mampu menggambarkan aktivitas serta partisipasi individu dalam pengaturan sosial, sedangkan dokumentasi pribadi berfokus pada catatan seseorang yang berkaitan dengan tindakan, kepercayaan, serta pengalamannya.

Penelitian ini mengkaji berbagai studi dokumen mulai dari mempelajari berbagai jurnal penulis terdahulu, buku pedoman pelaksanaan program bank sampah, peraturan tentang program pengelolaan sampah melalui bank sampah, serta data yang diperoleh melalui institusi atau lembaga terkait. Untuk dokumen terekam sendiri penulis menyertakan foto dengan para informan sebagai bukti telah melakukan wawancara.

#### 4. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari dasar acuan atau referensi dalam memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, sehingga para penulis dapat mengalokasikan sekaligus mengorganisasikan variasi pustaka dalam bidangnya (Sukardi, 2003). Penulis melakukan kajian studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai tulisan maupun artikel dokumen yang relevan dengan topik dan fenomena penelitian.

#### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut (Steiner, 1996) interpretasi memiliki perbedaan dengan analisis,

dimana konsep interpretasi dinilai memiliki kegiatan yang lebih mendalam serta ekstensif daripada kegiatan analisis. Pada sisi lain, interpretasi data tidak bisa dilakukan secara tunggal atau berdiri sendiri karena akan menghasilkan perbedaan interpretasi maka dari itu diperlukan analisis lebih lanjut dalam proses interpretasi data. Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif menjadi suatu usaha dalam mencari serta menyusun secara sistematis perolehan data guna memperluas pengetahuan penulis terkait fenomena penelitian serta menampilkannya sebagai suatu temuan (Rukin, 2021).

Untuk melakukan analisis dalam penelitian kualitatif sendiri dapat menggunakan beberapa cara, seperti yang dikemukakan oleh (A. Michael & Matthew, 1992) berikut ini.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, dan menyingkirkan data yang tidak perlukan dalam catatan lapangan. Reduksi data dalam analisis kualitatif berarti membuat keputusan data mana yang akan dipilih untuk dikaji lebih dalam dan menggunakan prinsip selektivitas.
2. *Data Display* (Tampilan Data), yaitu tahapan di mana data melangkah lebih jauh daripada tahap reduksi data. Tampilan data menyediakan berbagai macam keterangan dan informasi yang terorganisir dan terkompresi untuk memungkinkan terjadinya proses penarikan kesimpulan. Penampilan dan penyajian data dalam hal ini dapat berupa potongan teks yang diperluas, baik diagram, bagan, maupun matriks yang menyediakan cara baru untuk mengatur data yang lebih tertanam secara tekstual.

3. *Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi), yaitu merupakan tahap terakhir dari analisis kualitatif, dimana penulis membuat suatu kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan melalui proses verifikasi terkait data temuan dan yang sudah ditampilkan. Kegiatan analisis ini pada intinya merupakan kegiatan peninjauan kembali atas validasi data yang telah diperoleh.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini sudah dilakukan pada awal kegiatan observasi dan wawancara. penulis pada awalnya menganalisis data untuk keperluan identifikasi masalah sekaligus mencari konsep tertentu yang bisa mempermudah penulis dalam mempelajari situasi kondisi fenomena yang diangkat. Sesudah itu, pada saat kegiatan sedang berlangsung penulis melakukan analisis data guna memperinci fokus sekaligus melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. penulis menggunakan catatan kecil di kertas untuk mencatat apa yang dihasilkan di lapangan, mengumpulkan, memilah dan mensintesiskannya, menentukan pola hubungan serta membuat temuan baru. Tahapan akhir analisis data dilaksanakan guna menarik dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil eksplorasi data sebelumnya.

#### **1.8.8 Kualitas Data**

Kualitas data pada intinya berbicara tentang kelengkapan, keakuratan data, serta konsistensi dan ketepatan waktu (Batini dalam Nur Shofa et al., 2020). Pada hakekatnya, terdapat dua pokok yang menentukan kualitas data suatu penelitian, yang mana keduanya dapat terlihat dari kualitas instrumen dan kualitas

pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah penulis itu sendiri, karena penulis lah yang akan mengambil peran secara langsung di lapangan (Warul et al., 2015). Penelitian kualitatif dalam hal pengumpulan datanya harus bersifat menyeluruh dan sebisa mungkin menghindari terjadinya bias dan kekurangan sumber data (Cosmas, 2020). Untuk mempermudah proses pengumpulan data maka perlu dilakukan triangulasi.

Triangulasi sendiri merupakan cara yang digunakan untuk memadukan berbagai sumber data, teori, dan metode dalam sebuah penelitian terkait fenomena tertentu (Norman Kent, 1978).

1. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data dilakukan ketika pada saat proses penelitian penulis menggunakan berbagai macam sumber data yang terlibat dalam kajian penelitian. Sumber data yang diperoleh akan berbeda sudut pandangnya, yang mana sumber tersebut nantinya akan dikategorisasikan untuk diuji kredibilitasnya melalui pengecekan data yang sudah diperoleh.

2. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti berbicara tentang penggunaan sejumlah peneliti dari berbagai macam keilmuan yang berbeda dalam meneliti suatu fenomena serupa. Teknik ini dilakukan untuk memperluas pemahaman penulis sekaligus memperkaya data informasi yang diperoleh dari subjek yang menjadi sumber data penelitian.

3. Triangulasi teori

Triangulasi teori merujuk pada aplikasi teori secara jamak dalam

menganalisis seperangkat data (Suwardi, 2006). Triangulasi teori dilakukan dalam rangka pengkajian terhadap teori-teori yang relevan terhadap fenomena yang diteliti.

#### 4. Triangulasi metode

Triangulasi metode merupakan penggunaan berbagai macam metode pengumpulan data, seperti misalnya wawancara, observasi, studi dokumen, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber dilakukan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pemangku wilayah kelurahan setempat, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Bintari, pihak pengelola Bank Sampah Ngudi Lestari, nasabah, serta masyarakat umum yang terlibat dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Teknik ini dilakukan untuk meninjau kembali kualitas keabsahan data melalui kegiatan pengecekan data yang telah didapatkan dari berbagai sumber yang ada. Untuk menciptakan hasil penelitian yang kredibel maka penulis menghindari manipulasi data sehingga penulis menjunjung tinggi kejujuran dalam proses penelitian.